



PUPR

DINAS PEKERJAAN UMUM dan
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20 25

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen disusun mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat kabupaten selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini memuat informasi tentang Tujuan dan sasaran dari rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 -2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen tahun 2023 -2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen tahun 2023 -2026, Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.



Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025.



Bireuen, 18 Februari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen



Ir. FADHLI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan, yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama masa renstra 2023- 2026 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen tahun 2025 dengan Alat ukur indikator kinerja dari 7 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja. Adapun hasil pengukurannya sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	51,79	51,20	98,86

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	4,50	5,17	114,89

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	72,33	67,71	93,61

Sasaran 4 : Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan	Persen	0,42	0,32	76,19

	Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategi	Rencana Tata Ruang				
--	-------------------------------------	--------------------	--	--	--	--

Sasaran 5: Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	Persen	92,00	0	0

Pada Tahun 2025, Untuk sasaran strategis ini belum dapat dihitung capaian kinerja. Hal ini disebabkan indikator cakupan akses sanitasi layak belum memiliki realisasi karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan terkait. Akibatnya, nilai capaian tercatat 0% dan belum memenuhi target 90%. Hal ini menyebabkan tidak dapat dihitungnya capaian kinerja untuk sasaran *Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak*.

Sasaran 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	22,50	20,66	91,82

Sasaran 7: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100

Demikian ikhtiar capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang tentunya kedepan menjadi perhatian kami untuk pengembangan Sistem

pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Bireuen, 18 Februari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen



I. FADHLI, S.T.,M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19750826 200604 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.6. Sumber Daya Aparatur	6
1.7. Sarana dan Prasarana.....	8
1.8. Kinerja Pelayanan.....	9
1.9. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	9
1.10. Penghargaan yang Diraih di Tahun Berjalan	11
1.11. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan	14
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	17
2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	18
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
2.6 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025.....	22
2.7 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1. Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	29
3.3. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban dari satu instansi pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan/penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Kabupaten yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Bireuen, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggara Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bireuen diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bieuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026.

- p. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) Bireuen Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025, dimaksudkan untuk:

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan komitmen pemerintah Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (Reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* (*Orang yang tepat untuk tempat yang tepat*) sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen ini adalah untuk:

1. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen setelah RPK Bireuen ini disahkan hingga tahun 2026.
2. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berperan dan berfungsi maksimal sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sedangkan Susunan Organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Bidang Penataan Ruang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) UPTD, dan
- 9) Kelompok Jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag Umum dan Pejabat Fungsional serta Staf wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintahan Daerah maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan Penyusunan Program Anggaran
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
3. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan tata usaha, rumah tangga, Barang Milik negara dan barang milik daerah

4. Pembinaan aparatur
5. Pengelolaan urusan kepegawaian
6. Pengelolaan Administrasi Jabatan fungsional
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan
10. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan.

Bagan Struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 ,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 , Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan,jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pengendalian pembinaan teknis Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
- g. Pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pelaksaaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pelaksaaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang di berikan oleh Bupati.

1.6 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hokum berperadaban modern, demokratis, adil, makmur dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang professional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kapasitas, kapabilitas serta kompetensi aparatur negara khususnya pegawai negeri.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur itu sendiri, yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen ditunjang oleh 258 personil pada Akhir Tahun 2025, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
1.	PNS	106	Orang
2.	CPNS	22	Orang
3.	PPPK	15	Orang
2.	Tenaga Honorer	114	Orang
Jumlah		257	Orang

Sumber : Dinas PUPR Kab. Bireuen Tahun 2025

Tabel 1.2
SDM Perangkat Daerah (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P
1	SD Sederajat	-	-	-	-	7	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	18	-
3	SMA Sederajat	37	3	6	2	42	2
4	D2	1	-	-	-	-	-
5	D3	7	4	3	1	7	4
6	D4	1	-	-	-	-	-
7	S1	37	30	1	2	20	13
8	S2	5	3	-	-	-	1
9	S3	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		88	40	10	5	94	20
				257			

Sumber : Dinas PUPR Kab. Bireuen Tahun 2025

Tabel 1.3
SDM Perangkat Daerah (Berdasarkan Golongan)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	24	1	25
3	Golongan III	57	35	92
4	Golongan IV	11	-	11
5	Golongan IX	1	2	3
6	Golongan VII	3	1	4
7	Golongan V	5	3	8
				143

Sumber : Dinas PUPR Kab. Bireuen Tahun 2025

1.7 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Dinas PUPR	Unit	1		1
2	Mobil	Unit	9	1	10
3	Sepeda Motor	Unit	23	2	25
4	Laptop	Unit	20	8	28
5	Printer	Unit	26	26	52
6	Komputer	Unit	13	10	23
7	Kursi Staf	Unit	115	20	135
8	Kursi Tunggu	Unit	2		2
9	Kursi Rapat	Unit	10		10
10	AC	Unit	35	5	40
11	Kursi Pejabat / Kursi	Unit	21		21
12	Meja Pejabat	Unit	4		4
13	Meja Rapat	Unit	7		7
14	Meja Biro	Unit	10	7	17
15	Meja 1/2 Biro	Unit	30	12	42
16	Rak Buku	Unit	3		
17	Lemari Kayu	Unit	15	5	20
18	Lemari Metal	Unit	1		1
19	Brankas	Unit	1		1
20	Kursi Sofa	Unit	1		1
21	Scanner	Unit	1		1
22	Filing Kabinet	Unit	2	4	6

1.8 Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang meliputi:

- a. Bidang Bina Marga
- b. Bidang Cipta Karya
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Penataan Ruang
- e. Bidang Jasa Kontruksi

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya selalu berkaitan dengan institusi formal dan nonformal. Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dinas merupakan program strategis dan prioritas.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
2. Cakupan Akses Air Minum
3. Cakupan Akses Sanitasi Layak
4. Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik
5. Persentase Bangunan yang Terbangun
6. Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara
7. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik
8. Persentase Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertiikat Kompetensi
9. Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang.

1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, antara lain sebagai berikut :

a. Tantangan

Beberapa tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek.
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
4. Kebijakan pemimpin daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
5. Bencana alam (Gempa, Longsor, Banjir dan lain-lain).

b. Peluang

Selain tantangan sebagaimana di atas, terdapat beberapa peluang sebagai berikut :

1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Dinas, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.
3. Komitmen DPRK.
4. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Perkembangan teknologi dan informasi.

c. Isu Strategis

Isu strategis SKPK adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPK dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten Bireuen diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bireuen sesuai dengan RTRW kabupaten Bireuen. Dalam hal ini, peningkatan Sasaran dan Prioritas Pembangunan dan perbaikan konektivitas antarwilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Bireuen. Adapun isu strategis yang harus di tanggapi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen adalah :

1. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat;
2. Masih banyaknya gedung-gedung pemerintah serta insfrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai dan representative;
3. Sarana dan prasarana perpetaan, citra satelit, GIS, SIG peta Land Skep belum tersedia;
4. Terjadinya erosi dan kerusakan tebing sungai menyebabkan longsor yang mengancam daerah permukiman dan persawahan;
5. Pendangkalan aliran sungai dan jaringan irigasi sehingga menyebabkan banjir dan mengurangi debit air irigasi ke petak sawah;
6. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke jaringan irigasi;
7. Belum lengkapnya data base Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Jasa Konsruksi;
8. Masih tingginya persentase jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat.

9. Banyak tenaga pekerja Kontruksi belum memiliki sertifikat ahli kontruksi sehingga pekarja hanya mengandalkan pengalaman bukan ilmu tentang kontruksi yang baik.

1.10 Penghargaan yang Diraih di Tahun Berjalan

Adapun penghargaan yang diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Tahun 2022 sampai Tahun 2025 adalah :

1. Juara II Inovasi Pelayanan Publik “SAYA CHATING” (Sanitasi Air Minum Layak Cegah Stunting) Tahun 2022.
2. Penghargaan Capaian Renja Terbaik Tahun 2023.
3. Juara II Inovasi Peayanan Publik “PAPA SUPERMAN” (Penjaga Pintu air Manusia Super) Tahun 2023.
4. Juara I kategori pelayanan publik pada Tahun 2024 untuk inovasi “SATU BISA” (Stunting Turun Bireuen Sehat) dalam Penghargaan Innovative Government Award (IGA)
5. Terciptanya SISPAMPRO, sistem digital yang dikembangkan untuk memantau kemajuan proyek infrastruktur secara online dan berbasis partisipasi lintas sektor yang menjadi proyek inovasi yang dikembangkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bireuen pada tahun 2024.
6. Juara Harapan I Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkunagn Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025.
7. Pada Tahun 2025 untuk Inovasi SIGAP PUPR (Siap Tanggap PUPR) Dinas PUPR Kabupaten Bireuen dalam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) mendapat Juara III kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintah.





1.11 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2025 berupa Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang, Data Sumber Daya Aparatur tahun 2025, Data Sarana dan Prasarana Tahun 2025, permasalahan utama, Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi, Penghargaan yang diraih tahun berjalan serta Sistematika Penulisan.

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025.

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja persasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja persasaran dan pertujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

BAB. IV. PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bireuen pada tahun 2022, RPJM Kabupaten Bireuen Periode 2017-2022 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025. RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 berakhir pada tahun 2022, sehingga untuk perencanaan tahun 2023, Kabupaten Bireuen tidak memiliki dokumen perencanaan menengah daerah sebagaimana mestinya karena periode RPJMK berakhir. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Menindaklanjuti keadaan tersebut dan sejalan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, kepada bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah ini digunakan oleh pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen 2023-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif untuk perencanaan empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026. Perbedaan antara RPK Bireuen Tahun 2023-2026 dengan RPJMK periode sebelumnya tidak memuat visi dan misi kepala daerah dan tidak memerlukan KLHS. Dari sisi tahun pelaksanaan RPK direncanakan untuk empat tahun, sementara RPJMK direncanakan selama lima tahun. Penetapan RPJMK melalui qanun/perda, sementara RPK ditetapkan dengan perkada.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) Tahun 2023 -2026, terintegrasi dengan potensi sumber yang dimiliki oleh Kabupaten yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) Tahun yaitu dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPK Bireuen Tahun 2023 -2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPK Bireuen, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), sehingga renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir rencana pembangunan. Tujuan RPK ini perlu dirumuskan agar dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ini harus bersifat makro, dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, lintas sektor sesuai dengan tupoksi perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Selanjutnya, indikator tujuan ini harus didukung oleh beberapa sasaran dengan indikator yang tepat dan terukur serta dapat menjawab permasalahan kekinian daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu strategis yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen dalam empat tahun mendatang. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD. Pada akhir tahap RPJPD ini diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami” dapat terwujud.

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Berdasarkan Tujuan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023 -2026 sebagaimana tersebut diatas maka tujuan dan sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen adalah yaitu:

1. Tujuan :

- (1) Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas;
- (2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Dengan Arah Pola Ruang Dan Struktur Ruang;
- (3) Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
- (4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan.

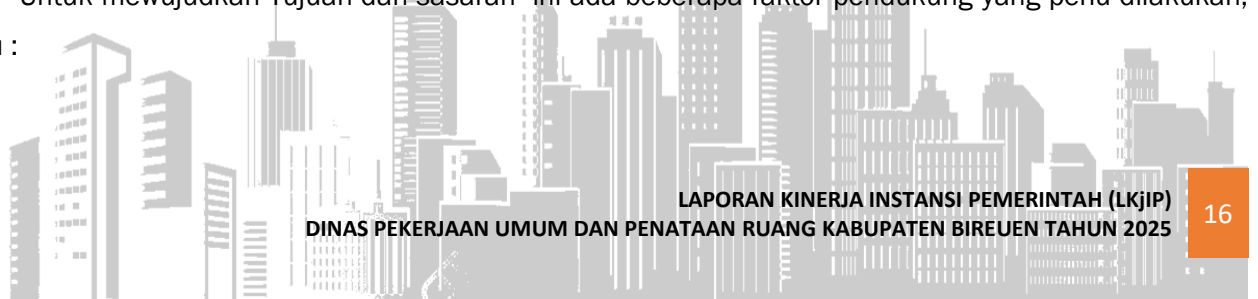
2. Sasaran :

- (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik;
- (3) Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan Dan Kawasan Strategis;
- (4) Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase;
- (5) Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi;
- (6) Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak;
- (7) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023 -2026 diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen mengurai tujuan dan sasaran tersebut dalam beberapa Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan jaringan jalan yang handal, terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas Jaringan Irigasi yang sangat memadai.
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan pengembangan infrastruktur yang terpadu, handal dan berkelanjutan.
4. Menerapkan penataan ruang sebagai acuan matra spacial dari pembangunan daerah dan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
5. Menyediakan pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, drainase dan air limbah.
6. Menerapkan organisasi yang efisien , tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang professional.

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, yaitu :



1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan Tata Ruang dan Jasa Kontruksi.
4. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak terkait.

Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai sesuai dengan tujuan.

2.3. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah tersusunya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan misi :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pemukiman ruang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintergrasi serta inovatif.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen adalah *Tersedianya infrastruktur Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan*

Ruang yang handal dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Bireuen yang bermantabat dan mandiri berlandaskan UUPA dengan misi :

1. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan jaringan jalan yang handal, terpadu dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi yang sangat memadai.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan pengembangan infrastruktur yang terpadu, handal dan berkelanjutan.
5. Menerapkan penataan ruang sebagai acuan matra spacial dari pembangunan daerah dan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
6. Menyediakan pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, drainase dan air limbah.

Telaahan dari Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan RPK Bireuen Tahun 2023- 2026 ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor- faktor penghambat :

- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor- faktor pendorong :

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi
- Komitmen Standar Operating Prosedure (SOP) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemampuan informasi dan teknologi.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Dukungan dana.

2. 4 Penentuan Isu-isu strategis

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, pada Lampiran C4 tentang penyajian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengemban tugas dan

fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 -2026.

Isu strategis adalah suatu kondisi/ kejadian atau keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi atau sebaliknya apabila dimanfaatkan akan meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, didalam mewujudkan amanat Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 -2026, maka berikut ini rumusan isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Rendahnya penyediaan infrastruktur dasar, Jumlah cakupan sanitasi layak baru mencapai 87,13 persen dan air minum layak sebesar 86,70 persen pada tahun 2021, belum memenuhi target SPM sebesar 100 persen;
- Kondisi jalan mantap di Kabupaten Bireuen masih rendah, hanya 57,54 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan proporsi jalan mantap provinsi sejumlah 77 persen, sedangkan jalan mantap nasional mencapai 98 persen.
- Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat rendah, sebanyak 300 orang (3,33 persen) dari 9.000 orang jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten Bireuen.



Tabel 2.1				
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Memperluas dan mengoptimalkan fungsi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Meningkatkan akses air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pola ruang dan Struktur ruang	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan Gedung
		Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	
Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			

2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023 -2026

Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaaan strategis instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2.
Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 -2026

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Sasaran (outcome)/Indikator capaian program	Satuan	Target				Formulasi Pengukuran	
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
1.1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	
2											
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	26,17	27,76	29,36	30,95	$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Total jaringan irigasi}} \times 100\%$	
3											
3.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum	Persen	88	89	90	91	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah KK di Kab. Bireuen}} \times 100\%$	
3.2			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan akses Sanitasi Layak	Persen	88	89	90	91	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK di Kab. Bireuen}} \times 100\%$	
4											
4.1	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pola ruang dan Struktur ruang	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Persen	54,80	56,02	57,33	58,64	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	
4.2			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	4,44	5,55	6,66	7,77	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Kab. Bireuen}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi atau analisis Kab. Bireuen}} \times 100\%$	
4.3			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase wilayah genangan yang tertangani	Persen	71,87	72,10	72,33	72,55	$\frac{\text{Luas genangan yang tertangani}}{\text{Luas genangan}} \times 100\%$	
4.4			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang terbangun	Persen	31,67	33,33	35	36,67	$\frac{\text{Luas gedung yang dibangun}}{\text{Jumlah target pembangunan gedung}} \times 100\%$
4.5				Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara	Persen	5	7,50	10	12,5	$\frac{\text{Luas gedung dan lingkungan yang terpelihara}}{\text{Jumlah target pemeliharaan gedung dan lingkungannya}} \times 100\%$
4.6				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan	Sesuai/tidak sesuai	Sesuai/tidak sesuai	Sesuai/tidak sesuai	Sesuai/tidak sesuai	Sesuai/tidak sesuai	Penyesuaian Berdasarkan Rekomendasi Teknis
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata ruang	Persen	0,21	0,45	0,42	0,6	$\frac{\text{Luas Area sesuai peruntukannya (RTRW)}}{\text{Luas Wilayah (Luas Rencana Pola Ruang)}} \times 100\%$	

2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023- 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat Pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan 2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
2	Memperluas dan mengoptimalkan fungsi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,36 Persen
3	Meningkatkan akses air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum	90 Persen
	Meningkatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan akses Sanitasi Layak	90 Persen
4	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	57,33 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	6,66 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	72,33 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang terbangun	35 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara	10 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai / Tidak Sesuai
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata ruang	0,42 Persen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen seiring berjalannya tahun Anggaran 2025 mengalami beberapa perubahan Target Indikator Kinerja yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya air, Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara Program Penataan Bangunan dan lingkungannya serta penambahan indikator kinerja Persentase

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata ruang pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ada Pada Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2025 dan dapat dilihat dalam tabel 2.4 dibawah ini;

Tabel 2.4
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	
				Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen
2	Memperluas dan mengoptimalkan fungsi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,36 Persen	22,50Persen
3	Meningkatkan akses air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum	90 Persen	92 Persen
	Meningkatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan akses Sanitasi Layak	90 Persen	0 Persen
4	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	57,33 Persen	51,79 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	6,66 Persen	4,10 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase wilayah genangan yang tertangani	72,33 Persen	72,33 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang terbangun	35 Persen	37 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara	10 Persen	0 Persen
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai / Tidak Sesuai	Sesuai / Tidak Sesuai
	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata ruang	0,42 Persen	0,42 Persen

2.7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang inginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 mengacu pada RKPK Tahun 2025 dan dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen 2023-2026.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan dari pada perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran –Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 , Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKJIP Perangkat Daerah	BB Kategori
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	29,36 Persen
3.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Rata – rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	90 Persen
4.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	0,42 Persen
5.	Meningkatnya jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	57,33 Persen
6.	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	72,33 Persen
7.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penyediaan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	6,66 Persen

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.502.375.690	APBK
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.310.750.000	APBK DAK DIF
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.844.480.000	APBK DAK
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	APBK
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	300.000.000	APBK
6	Program Penataan Bangunan Gedung	15.314,358.269	APBK DOKA
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	-	

8	Program Penyelenggaraan Jalan	55.534.054.114	APBK DAK DOKA DBH
9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	57.032.400	APBK
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	240.000.000	APBK

Setelah keluarnya Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2025 maka Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang Kabupaten Bireuen menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 seperti dibawah ini:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKJIP perangkat daerah	BB Kategori
2	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	51,79 Persen
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	0,42 Persen
4	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	72,33 Persen
5	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penyediaan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	4,50 Persen
6	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	92,00 Persen
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	22,50 Persen

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.223.807.454,-	APBK
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.956.033.259,-	APBK
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.121.970.900,-	APBK DAK

4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	200.000.000,-	APBK
6	Program Penataan Bangunan Gedung	8.454.716.268,-	APBK
7	Program Penataan Bangunan Lingkungannya	-	-
8	Program Penyelenggaraan Jalan	38.260.247.508,-	APBK DAK DOKA DBH DIF
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	38.330.800,-	APBK
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	205.556.800,-	APBK



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja Tahun 2025 digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja (IK) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:



No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ix/6/8/2003

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja tahunan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Rencana Kerja Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 - 2026 dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen terdiri dari:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.2 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

Pada bagian ini akan merepresentasikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tujuan -1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang
Indikator Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap 2. Persentase kesesuaian usulan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi yang dikeluarkan

Indikator kinerja tujuan, target dan realisasi dari tujuan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
 Capaian Kinerja Tujuan RPK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Realisasi 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	59,37	60,01	59,57	99,27
2	Persentase kesesuaian usulan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi yang dikeluarkan	100	100	100	100
Rata-rata persentase tingkat capaian					99,64

Capaian indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 59,37% atau 716,99 Km dari Panjang jalan kabupaten 1207,67 Km. Selama lima tahun terakhir jalan kabupaten semakin baik. Jalan kondisi mantap pada tahun 2024 mencapai 59,37 persen meningkat dari kondisi tahun 2020 (52,43 persen). Adapun pada tahun 2025 indikator persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 59,57 persen dengan capaian indikator 99,27 persen.

Indikator Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang dikeluarkan menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Pada tahun 2024 capaian tercatat sebesar 100%, dan pada tahun 2025 target sebesar 100% juga berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas dalam proses evaluasi serta penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang, sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku. Dibawah ini juga tersajikan capaian kinerja dari Dinas PUPR Kabupaten Bireuen Pada Tahun 2025

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PUPR Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKJIP perangkat daerah	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	51,79	51,20	98,86

3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan Dan Kawasan Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	0,42	0,32	76,19
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	72,33	67,71	93,61
5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	4,50	5,17	114,89
6	Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	92,00	0	0
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	22,50	20,66	91,82

Adapun rincian hasil analisis capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik

Pada sasaran **Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik** dengan indikator persentase jalan dalam kondisi baik, capaian kinerja tahun 2025 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	51,79	51,20	98,86

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:



Tabel 3.4

Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	51,79	51,20	98,86

1) **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

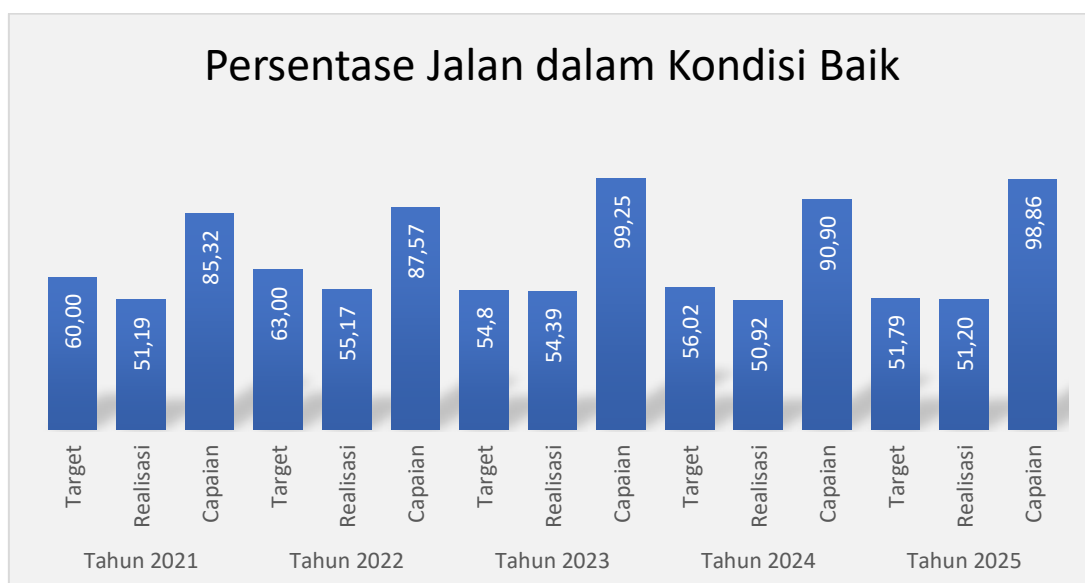
Adapun rumus perhitungan Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{618,38}{1207,67} \times 100\% = 51,20 \%$$

Pada tahun 2025, Dinas PUPR Kabupaten Bireuen menetapkan sasaran Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik, yang diukur melalui indikator Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 51,79 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 51,20 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 98,86 persen.

2) **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**



Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik dari Tahun 2021 s/d 2025

Grafik diatas menunjukkan nilai dari target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator persentase jalan dalam kondisi baik selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan grafik persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2021-2025, terlihat bahwa capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang baik meskipun terjadi fluktuasi pada target dan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat 618,25 KM jalan dalam kondisi baik, target sebesar 60,00% belum dapat tercapai dengan realisasi 51,19% sehingga capaian berada pada angka 85,32%. Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 63,00%, namun realisasi justru menurun menjadi 55,17% (666,24 KM) sehingga capaian tercatat sebesar 87,57%. Memasuki tahun 2023, target diturunkan menjadi 54,8% dan realisasi hampir sepenuhnya tercapai yaitu 54,39%, yang berdampak pada lonjakan capaian menjadi 99,25%. Hal ini menunjukkan kesesuaian yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan program, selain itu peningkatan ini juga disebabkan karena adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk subkegiatan pembangunan jalan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, target kembali dinaikkan menjadi 56,02%, namun realisasi turun ke 50,92% sehingga capaian menurun menjadi 90,90%.

Penurunan capaian persentase jalan dalam kondisi baik yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan. Target yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dicapai, sehingga berdampak pada turunnya tingkat capaian. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, tingkat capaian tersebut masih tergolong baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar target tetap dapat dipenuhi.

Setelah capaian menurun pada tahun 2024 akibat realisasi yang belum sepenuhnya memenuhi target, pada tahun 2025 target ditetapkan lebih realistis yaitu 51,79% dan hampir seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 51,20%. Kondisi ini mendorong kenaikan capaian menjadi 98,86%, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian strategi, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, kinerja pada tahun 2025 mencerminkan kemampuan Dinas PUPR Kabupaten Bireuen dalam melakukan evaluasi atas capaian sebelumnya dan menerjemahkannya ke dalam perencanaan yang lebih tepat sasaran, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi baik karena adanya pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut. Dan untuk solusi mendapatkan kondisi jalan yang baik sampai dengan 100% di Kabupaten Bireuen diharapkan agar pendanaan untuk pembangunan jalan selalu menjadi prioritas utama.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga

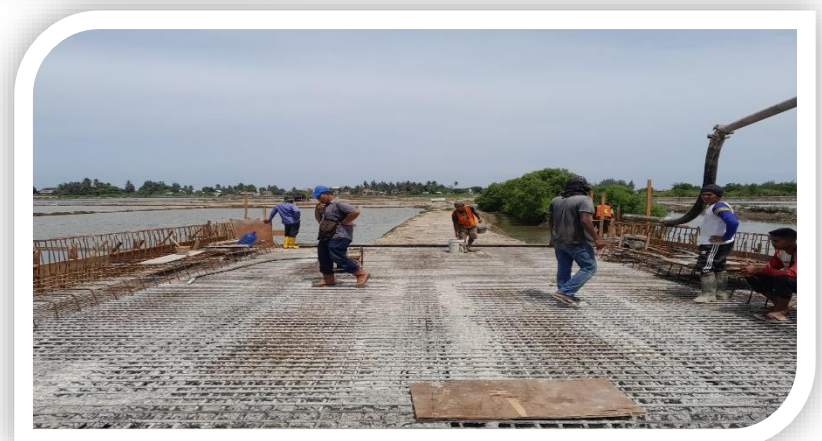
keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Keberhasilan pada sasaran program penyelenggaraan jalan dapat dilihat pada foto dokumentasi di bawah ini:

**Pengawasan Teknis
Pemeliharaan Berkala
Jalan (PBH)**



**Pengawasan Teknis
Pembangunan Jalan
Wilayah II (DOKA)**

**Pengawasan Teknis
Pembangunan
Jembatan (DOKA)**



4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	54,39	50,92	51,20

Untuk Indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel diatas , Untuk capaian tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan kinerja karena bertambahnya ruas jalan yang rusak, baik itu rusak berat maupun rusak ringan. Pada tahun 2025, realisasi indikator mengalami peningkatan menjadi 51,20 persen, atau naik sebesar 0,28 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan jalan dan jembatan yang mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi infrastruktur.

5) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional;**

Tabel 3.6

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja standar nasional

Indikator kinerja	Nasional	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Nasional	2025	Persen	95,00	93,65	98,57

Sumber : <https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/>

Pada tahun 2025, indikator Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap secara nasional ditetapkan dengan target sebesar 95,00 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 93,65 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 98,57 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator pada tingkat nasional, capaian kinerja kabupaten menunjukkan tingkat pencapaian yang relatif sejalan dalam hal persentase capaian terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan, peningkatan, dan rehabilitasi

infrastruktur jalan dan jembatan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kualitas jaringan transportasi.

6) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Sasaran **Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik** tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.7

Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “**Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik**”

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38.260.247.508,00	31.349.848.100,00	81,94

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran pada Triwulan II dan Triwulan III tahun 2025.
2. Perencanaan dan Database Jalan yang baik sangat mendukung untuk keberhasilan pencapaian sasaran.
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran.
4. Kerja sama tim yang baik dan terarah sesuai arahan atasan adalah kunci keberhasilan pencapaian sasaran.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain :

1. Faktor bencana alam (longsor dan curah hujan tinggi) menjadi Faktor utama kegagalan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik.
2. Meningkatnya harga bahan bangunan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen sehingga berpengaruh pada target capaian kinerja.



7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Program penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	98,86	81,94	16,92

Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 98,86%, yang berarti hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan. Di sisi lain, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 81,94%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan tingkat efisiensi sebesar 16,92%. Artinya, output program tetap dapat dicapai secara optimal meskipun realisasi anggaran lebih rendah dari alokasi yang direncanakan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dapat dinilai efektif dan efisien karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang sangat tinggi dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari perencanaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi

Pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi** dengan indikator Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat, capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	4,50	5,17	114,89

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Dan Penyedia Jasa Konstruksi, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.10

Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Jalan Dan Jembatan dalam Kondisi Baik

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	4,50	5,17	114,89

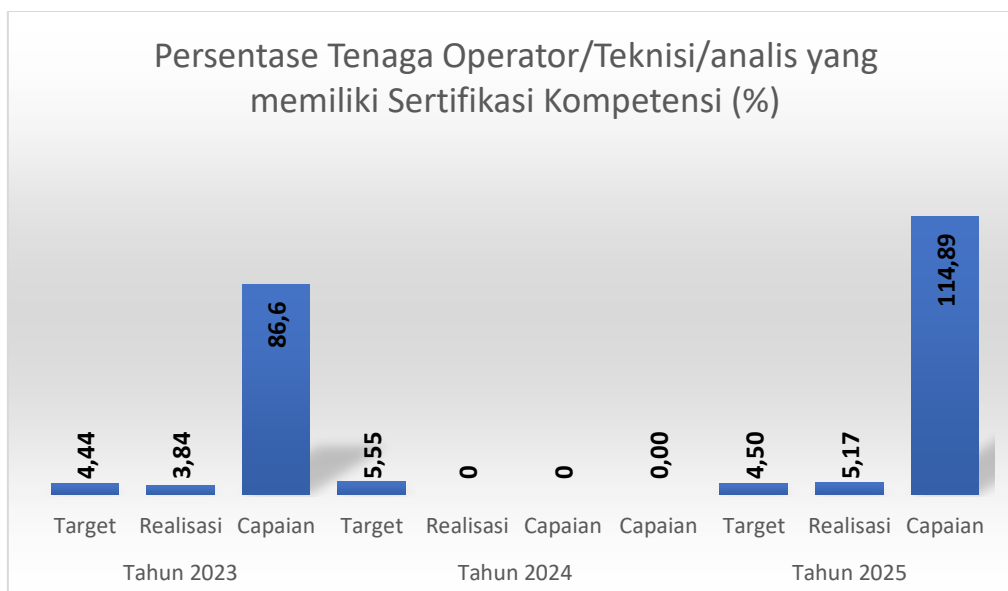
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kab. Bireuen}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kab. Bireuen}} \times 100\%$$

$$\frac{465}{9000} \times 100\% = 5,17 \%$$

Pada tahun 2025, Dinas PUPR Kabupaten Bireuen menetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Konstruksi, yang diukur melalui indikator Persentase Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang Bersertifikat dengan target sebesar 4,50 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 5,17 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 114,89 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target yang telah ditetapkan, menandakan bahwa upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi telah berjalan dengan sangat baik.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



Berdasarkan data persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi, pada Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 4,44% dengan realisasi sebesar 3,84%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 86,6%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun realisasi telah mendekati sasaran perencanaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi pelaksanaan agar target dapat tercapai secara optimal.

Pada Tahun 2024, tidak terdapat realisasi (0%). Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi, sehingga program tidak dapat dilaksanakan. Ketiadaan dukungan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap terhentinya upaya peningkatan jumlah tenaga yang tersertifikasi pada tahun berjalan. Dengan demikian, faktor ketersediaan anggaran menjadi aspek krusial yang memengaruhi keberlangsungan dan pencapaian kinerja program.

Tahun 2025, kegiatan sertifikasi kembali dilaksanakan dengan target sebesar 4,50% dan realisasi sebesar 5,17% atau sekitar 465 tenaga kerja konstruksi terlatih, sehingga tingkat capaian mencapai 114,89%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program dan kinerja dapat meningkat secara signifikan ketika kegiatan dilaksanakan secara optimal.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat karena adanya pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut. Untuk solusi mendapatkan tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat sampai dengan 100% di Kabupaten Bireuen diharapkan agar pendanaan untuk pengembangan jasa konstruksi selalu menjadi prioritas utama. Adapun Program dan Kegiatan yang

mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat ini adalah Program Pengembangan jasa konstruksi.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Keberhasilan pada sasaran ini dapat dilihat pada dokumentasi di bawah ini:



4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	3,84	0	114,89

Berdasarkan tabel realisasi indikator kinerja *Persentase Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang Bersertifikat*, pada Tahun 2023 tercatat realisasi sebesar 3,84%. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi (0%) yang disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran sehingga kegiatan sertifikasi tidak dapat dilaksanakan. Pada Tahun 2025, realisasi meningkat signifikan dengan capaian sebesar 114,89% terhadap target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, analisis periode 2023–2025 menunjukkan bahwa stabilitas pendanaan merupakan faktor kunci dalam menjaga kesinambungan dan capaian indikator kinerja. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang konsisten dan berkelanjutan menjadi aspek strategis untuk memastikan peningkatan jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat dapat terus berlangsung dan memberikan dampak positif terhadap mutu dan keselamatan pekerjaan konstruksi.

5) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional**

Tabel 3.12
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja Nasional

Indikator kinerja	Nasional	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	Nasional	2025	Persen	100,00	66,2	66,2

Sumber : <https://binakonstruksi.pu.go.id/>

Pada tahun 2025, indikator Persentase Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang Bersertifikat secara nasional ditargetkan sebesar 100,00 persen. Namun demikian, berdasarkan hasil pengukuran kinerja,

realisasi yang dicapai sebesar 66,2 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan juga sebesar 66,2 persen. Jika dibandingkan, capaian Kabupaten Bireuen menunjukkan nilai yang lebih tinggi yang berarti peningkatan jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat dapat terus berlangsung dan meningkat secara signifikan serta kegiatan dilaksanakan secara optimal.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.13

Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	38.330.800,00	21.871.200,00	57,1

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran.
- Kerja sama tim yang baik dan terarah sesuai arahan atasan adalah kunci keberhasilan pencapaian sasaran.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain :

- Keterbatasan alokasi anggaran, yang mengakibatkan kegiatan sertifikasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau bahkan tidak terlaksana sama sekali, sebagaimana terjadi pada Tahun 2024.
- Perencanaan program yang belum optimal, termasuk dalam penetapan target, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.14

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	114,89	57,1	57,79

Berdasarkan data di atas, persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 114,89%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, persentase penyerapan anggaran tercatat sebesar 57,1%, yang berarti realisasi penggunaan anggaran berada pada tingkat sedang dan tidak seluruh pagu anggaran terserap. Dengan tingkat efisiensi sebesar 57,79%, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang tinggi diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan alokasi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program, di mana output yang dihasilkan mampu melampaui target tanpa harus menyerap seluruh anggaran.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase

Pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase** dengan indikator Persentase saluran drainase dalam kondisi baik, capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	72,33	67,71	93,61

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.16
Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	72,33	67,71	93,61

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

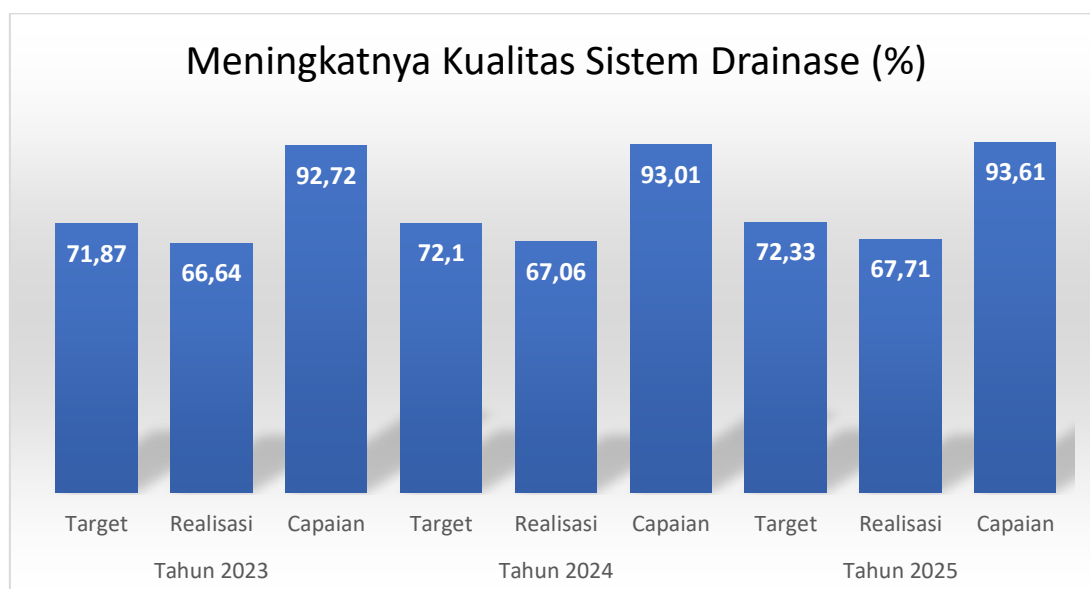
Adapun rumus perhitungan Indikator Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang Drainase}} \times 100\%$$

$$\frac{39413}{58206} \times 100\% = 67,71 \%$$

Pada tahun 2025, kualitas sistem drainase terus ditingkatkan dengan target persentase saluran drainase dalam kondisi baik sebesar 72,33% dan realisasi mencapai 67,71%, atau 93,61% dari target.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Sistem Drainase dari Tahun 2023 s/d 2025

Berdasarkan data pada grafik di atas, terlihat bahwa kualitas sistem drainase mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, target sebesar 71,87% dengan realisasi 66,64% menghasilkan capaian 92,72%, yang menunjukkan kinerja sangat baik meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target. Pada tahun 2024, meskipun realisasi hanya meningkat tipis menjadi 67,06% dibandingkan tahun sebelumnya, capaian justru mengalami kenaikan menjadi 93,01%, seiring dengan penyesuaian target menjadi 72,10%. Selanjutnya pada tahun 2025, target kembali meningkat menjadi 72,33% dengan realisasi 67,71%, sementara capaian mencapai 93,61%, yang merupakan nilai tertinggi selama tiga tahun. Secara keseluruhan, ini menunjukkan adanya peningkatan pada capaian kualitas sistem drainase, mencerminkan efektivitas program dan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun, meskipun realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan.

3) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

Jika dilihat dari grafik sebelumnya, kinerja tidak menunjukkan penurunan, melainkan cenderung stabil dan meningkat, Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik didukung dengan Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase. Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah perencanaan yang lebih terstruktur dan realistis, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Selain itu, adanya peningkatan koordinasi antar pihak terkait serta dukungan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, turut mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. Koordinasi lintas sektor, khususnya antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, juga memungkinkan permasalahan di lapangan dapat segera diatasi, sehingga capaian kinerja meningkat setiap tahun.

Meski capaian terus menunjukkan hasil positif, realisasi yang belum mencapai target menandakan adanya tantangan yang masih harus dihadapi. Kendala seperti cuaca buruk, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan kondisi lapangan yang sulit menjadi hambatan utama dalam proses pelaksanaan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kendala administratif juga bisa berpengaruh terhadap pencapaian realisasi di lapangan.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Keberhasilan pada sasaran ini dapat dilihat pada dokumentasi di bawah ini:





- 4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	66,64	67,06	67,71

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja *Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik*, terlihat adanya peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, capaian realisasi tercatat sebesar 66,64%, kemudian meningkat menjadi 67,06% pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 67,71% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas saluran drainase. Meskipun peningkatannya relatif bertahap, hal positif tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur drainase guna mendukung pengendalian banjir serta meningkatkan kualitas lingkungan.

- 5) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kabupaten/Kota**

Tabel 3.18
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun

Terhadap Target Kinerja Standar Nasional/Dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

Indikator Kinerja	Kabupaten	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian %
Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	Aceh Tengah	2025	Persen	65,00	70,86	109,01

Sumber: Dinas PERKIM kab Aceh Tengah

Pada tahun 2025, Kabupaten Aceh Tengah menetapkan indikator dengan target 65,00 persen berhasil direalisasikan sebesar 70,86 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,02 persen dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target yang ditetapkan, menandakan kinerja dalam pencapaian indikator ini sangat baik. Sedangkan Kabupaten Bireuen menargetkan 72,33% saluran drainase dalam kondisi baik, dan realisasi mencapai 67,71%, atau 93,61% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun progres sudah cukup baik, Bireuen masih perlu meningkatkan upaya agar target dapat tercapai sepenuhnya.

6) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 3.19

Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	200.000.000,00	199.537.000,00	99,8

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- c. Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran.
- d. Kerja sama tim yang baik dan terarah sesuai arahan atasan adalah kunci keberhasilan pencapaian sasaran.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain :



- a. Meningkatnya harga bahan bangunan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen sehingga berpengaruh pada target capaian kinerja.

7) **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.20
 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	93,6	99,8	-6,2

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase mencatat capaian kinerja sebesar 93,6%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan dengan baik. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,8%, yang berarti hampir seluruh pagu anggaran yang tersedia telah digunakan. Kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -6,2%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran relatif lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Dengan kata lain, program ini belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Ke depan, diperlukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian biaya agar penggunaan sumber daya dapat lebih selaras dengan tingkat capaian kinerja yang ditargetkan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis

Pada sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategi** dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21
 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan	Persen	0,42	0,32	76,19

		Rencana Tata Ruang				
--	--	--------------------	--	--	--	--

Adapun Program-program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis, Dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.22

Program-program yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang Terbangun	Persen	37,00	37,00	100,00
2	Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara	Persen	0	0	0
3	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

1) **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Adapun rumus perhitungan Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas Area sesuai peruntukannya (RTRW)}}{\text{Luas Wilayah (Luas Rencana Pola Ruang)}} \times 100\%$$

$$\frac{568,537 \text{ Ha}}{179,696 \text{ Ha}} \times 100\% = 0,32 \%$$

rumus perhitungan Indikator Persentase Bangunan yang Terbangun

$$\frac{\text{Luas Gedung yang dibangun}}{\text{Jumlah target pembangunan gedung}} \times 100\%$$

$$\frac{1768}{4779} \times 100\% = 37,00 \%$$

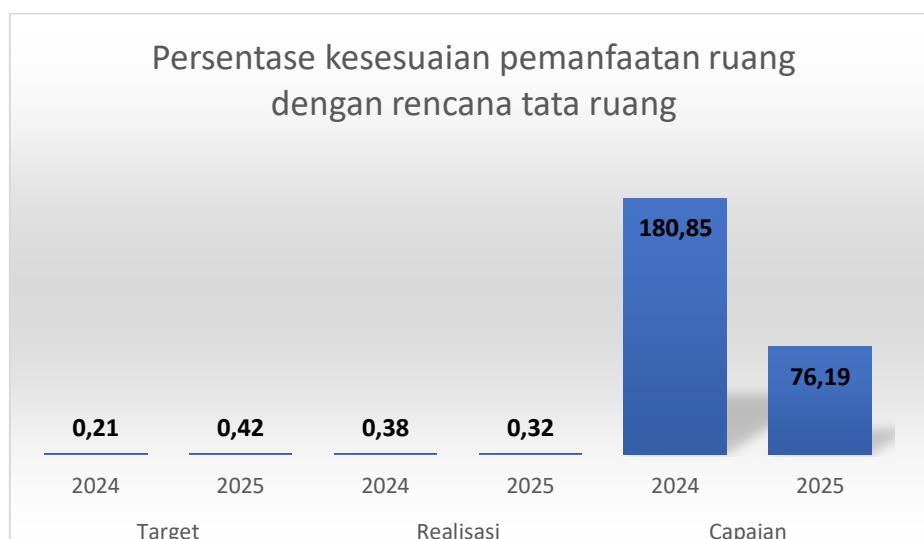
rumus perhitungan Indikator Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara

$$\frac{\text{Jumlah gedung dan lingkungannya yang terpelihara}}{\text{Jumlah target gedung dan lingkungannya yang dipelihara}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2025, sasaran peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis ditetapkan dengan target 0,42%. Realisasi mencapai 0,32%, atau 76,19% dari target. Meskipun capaian masih di bawah target, hasil ini menunjukkan adanya progres dalam menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang, dan menjadi dasar bagi upaya perbaikan lebih lanjut agar kesesuaian ruang dapat tercapai sesuai rencana.

2) **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**



Perkembangan capaian indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang menunjukkan adanya fluktuasi kinerja selama tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 0,38% melampaui target 0,21% dengan tingkat capaian 180,85%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program. Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi, pembinaan, serta pengawasan berjalan optimal. Namun pada tahun 2025, meskipun realisasi mencapai 0,32% peningkatan target menjadi 0,42% menyebabkan capaian hanya sebesar 76,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan standar kinerja belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis evaluasi tahun sebelumnya, peningkatan intensitas pengawasan, serta optimalisasi sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target pada tahun 2025 serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Untuk perbandingan tahun 2023, tidak dapat diperbandingkan karena indikator ini muncul tahun 2024 setelah adanya evaluasi AKIP tahun 2023 Nomor B/136/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023,

Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dan arahan tim evaluasi Menpan RB pada kegiatan Asistensi SAKIP, RB dan ZI tanggal 29-30 April 2024 di Jakarta.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Capaian indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang pada tahun 2024 yang mencapai 180,85% dari target 0,21 menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Keberhasilan ini didukung oleh adanya pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta perbaikan target kinerja.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja menjadi 76,19% dari target 0,42. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya target yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mencapainya. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain dinamika perkembangan pembangunan yang tidak sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta masih adanya pelaku usaha atau masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan tata ruang.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis sampai dengan 100% di Kabupaten Bireuen diharapkan agar pendanaan untuk program program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis selalu menjadi prioritas utama.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kinerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan di tingkatkan. Keberhasilan pada sasaran ini dapat dilihat pada dokumentasi di bawah ini:





**Pembangunan
Gudang Barang
Bukti**

**Rapat
Koordinasi
tentang
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang**



**Pembangunan
Rumah Dinas**

**Rapat
Koordinasi
Kegiatan
RDTR
Kawasan
Perkotaan
Samalanga**



- 4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.23
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun
Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persen	-	0,38	0,32

Berdasarkan Tabel di atas, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,38 persen dan menurun menjadi 0,32 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD. Penurunan capaian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, evaluasi, dan penegakan kebijakan tata ruang agar pemanfaatan ruang dapat lebih optimal dan sejalan dengan rencana strategis daerah.

- 5) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kabupaten**

Tabel 3.24

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja Standar Dalam Kabupaten

Indikator Kinerja	Kabupaten	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian %
Ketaatan terhadap RTRW	Aceh Tengah	2025	Persen	50,00	48,00	96,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang yang diukur melalui indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW dengan target sebesar 50,00 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 48,00 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 96,00 persen.

Jika dibandingkan dengan indikator ini, capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada kabupaten Bireuen menunjukkan hasil yang relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja pada aspek perencanaan dan pengendalian tata ruang telah berjalan cukup baik, namun implementasi kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan masih memerlukan peningkatan agar dapat sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

6) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis** tersebut dicapai melalui program-program pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25

Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis”**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penataan Bangunan Gedung	8.454.716.268,00	8.055.188.800,00	95,3
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	0	0	0
Program Penyelenggaraan Penataan ruang	205.556.800,00	205.231.317,00	99,8

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain :



1. Anggaran Untuk Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis selalu diprioritaskan dan bertambah dari tahun ke tahun.
2. Perencanaan yang baik sangat mendukung untuk keberhasilan pencapaian sasaran.
3. Sumber Manusia yang berkualitas menjadi faktor Penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran.
4. Kerja sama tim yang baik dan terarah sesuai arahan atasan adalah kunci keberhasilan pencapaian sasaran.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatnya harga bahan bangunan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen sehingga berpengaruh pada target capaian kinerja.
2. Adanya Program kegiatan yang tidak ada pagu anggaran tahun 2025.

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.26
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Penataan Bangunan Gedung	100	95,3	4,7
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	0	0	0
Program Penyelenggaraan Penataan ruang	100	99,8	0,2

Berdasarkan data capaian kinerja dan penyerapan anggaran, Program Penataan Bangunan Gedung mencapai 100 persen dengan tingkat penyerapan anggaran 95,3 persen, menghasilkan efisiensi sebesar 4,7 persen.. Efisiensi kinerja ini sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang berhasil mencapai 100 persen capaian kinerja dengan penyerapan anggaran 99,8 persen, menghasilkan efisiensi 0,2 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar program berjalan sesuai target dengan penggunaan anggaran yang

efisien, meskipun terdapat program yang belum dilaksanakan yang memerlukan perhatian dan percepatan pelaksanaan.

Tujuan -2		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Indikator Tujuan	Tingkat Capaian SPM Layanan Sanitasi, Air Minum Dan perumahan	

Indikator kinerja tujuan, target dan realisasi dari tujuan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.27
 Capaian Kinerja Tujuan RPK Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Persen Tingkat capaian
1.	Tingkat Capaian SPM Layanan Sanitasi, Air Minum Dan perumahan	84,88	95,81	86	0	0
Rata-rata persentase tingkat capaian						0

Pada tahun 2025, indikator kinerja *Tingkat Capaian SPM Layanan Sanitasi, Air Minum Dan perumahan* belum dapat dihitung karena realisasi tercatat **0%**. Ini disebabkan karena layanan sanitasi tidak dapat dihitung capaiannya akibat tidak adanya kegiatan terkait pada tahun 2025 akibat ketiadaan alokasi anggaran. Selain itu, untuk indikator perumahan tidak tercatat karena data dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), sehingga realisasi perumahan juga tidak dapat dimasukkan dalam laporan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan signifikan antara target 86% dan capaian aktual. Untuk itu, diperlukan perencanaan anggaran yang memadai, percepatan pelaksanaan program, dan koordinasi lintas dinas agar realisasi dapat tercatat dan sasaran strategis tercapai pada periode berikutnya.

Sasaran 5: Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak

Pada sasaran Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak dengan indikator kinerja yaitu Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi, tahun 2025 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 3.28
 Capaian Sasaran **Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak** Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi	Persen	92,00		0

	layak			0	
--	-------	--	--	---	--

Adapun Program-program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.29

Program-program yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Air Minum	Persen	92,00	92,00	100,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	0	0	0

1) **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Adapun rumus perhitungan Indikator Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cakupan akses air minum} + \text{cakupan akses sanitasi layak}}{2} \times 100\%$$

Adapun rumus perhitungan Indikator Cakupan Akses air Minum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki akses air minum Layak}}{\text{Jumlah KK dikabupaten Bireuen}} \times 100\%$$

$$\frac{1203351}{130819} \times 100\% = 92,00 \%$$

Adapun rumus perhitungan Indikator Cakupan Akses Sanitasi Layak adalah sebagai berikut :

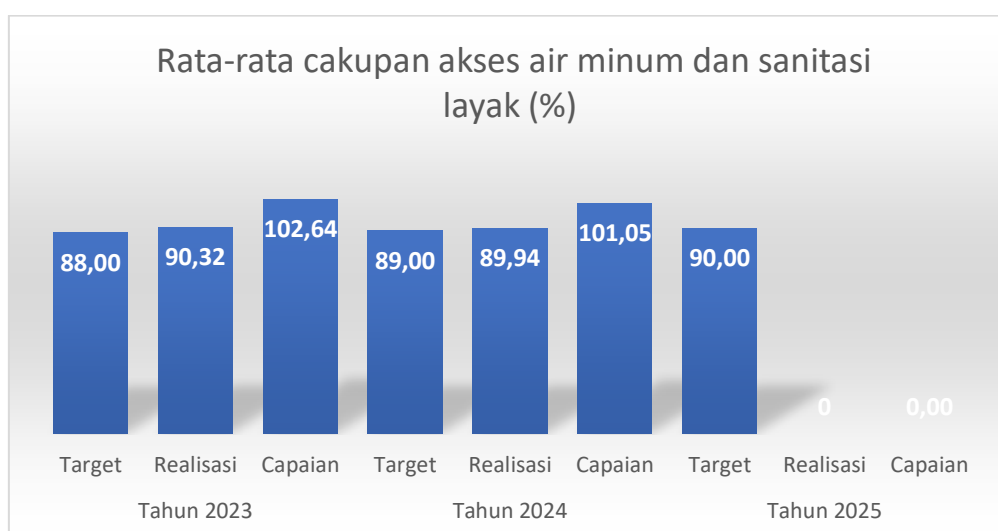
$$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sanitasi Layak}}{\text{Jumlah KK dikabupaten Bireuen}} \times 100\%$$

Nilai indikator Rata-rata cakupan akses air minum dihasilkan dari merata-ratakan cakupan kedua layanan, yaitu cakupan akses air minum dan cakupan akses sanitasi layak lalu menyajikannya dalam

bentuk persentase. Pada Tahun 2025, Untuk sasaran strategis ini belum dapat dihitung capaian kinerja. Hal ini disebabkan indikator cakupan akses sanitasi layak belum memiliki realisasi karena tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program terkait, akibat dari terjadinya efisiensi anggaran tahun 2025 yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Hal ini berdampak pada nilai capaian tercatat 0% dan belum memenuhi target 90%, karena tidak dapat dihitungnya capaian kinerja untuk sasaran *Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak*.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Indikator *Rata-Rata Cakupan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak* menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 90,32% melampaui target 88,00% dengan capaian 102,64%. Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi 89,94% dari target 89,00% dan capaian 101,05%. Meskipun persentase capaian sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, secara substansi kinerja tetap stabil dan berada di atas target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 90,00%, namun belum terdapat realisasi (0%), ini disebabkan indikator cakupan akses sanitasi layak belum memiliki realisasi karena tidak tersedianya anggaran sehingga berdampak pada tidak adanya kegiatan. Akibatnya, nilai capaian tercatat 0% dan belum memenuhi target 90%.

Nilai indikator Rata-rata cakupan akses air minum dihasilkan dari merata-ratakan cakupan kedua layanan, yaitu cakupan akses air minum dan cakupan akses sanitasi layak lalu menyajikannya dalam bentuk persentase. Berikut perbandingan kedua cakupan layanan tersebut beberapa tahun terakhir

Tabel 3.30

 Indikator Kinerja yang mendukung untuk Capaian Sasaran **Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak**

Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %	2024		Nilai Capaian %	2023		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Cakupan Akses air Minum	Persen	92	92,00	100	89	91,62	102,9	88	89,65	101,87
Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	90	0	0	89	88,26	99,16	88,5	91,00	102,83

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Adapun penyebab tidak adanya capaian peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak pada tahun 2025 karena tidak adanya pendanaan yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta perbaikan target kinerja. Dan untuk solusi sasaran strategis Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak sampai dengan 100% di Kabupaten Bireuen diharapkan agar pendanaan untuk program program yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak selalu menjadi prioritas utama.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kinerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan lintas sektor seperti Bappeda, Dinkes, DPMGPKB, PDAM dan para camat didalam kabupaten Bireuen, sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Keberhasilan pada sasaran ini dapat dilihat pada dokumentasi di bawah ini



4) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.31
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	Persen	-	-	90,32	89,94	0

Untuk Indikator Rata-rata Cakupan Akses air minum dan Sanitasi Layak tidak dapat diperbandingkan, karena indikator ini tidak ada dalam sasaran strategi RPJMK, renstra tahun 2018- 2022 dan renstra Perubahan 2018-2022. Indikator ini ada setelah penyusunan RPK tahun 2023- 2026 dan realisasi dari tahun 2024 adalah 89,94 persen dan pada tahun 2025 tidak dapat dihitung karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada program yang mendukung indikator ini.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar dalam provinsi aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.32
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun
 Terhadap Target Kinerja Provinsi Aceh

Indikator Kinerja	Provinsi	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
Cakupan Akses air Minum	Aceh	2025	Persen	88,6	92,06	103,9
Cakupan Akses Sanitasi Layak	Aceh	2025	Persen	79,5	82,21	103,4

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU0IzI>

Pada tahun 2025, Provinsi Aceh menargetkan cakupan akses air minum sebesar 88,6 persen dan cakupan akses sanitasi layak sebesar 79,5 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai untuk cakupan akses air minum adalah 92,06 persen, sehingga tingkat capaian mencapai 103,9 persen dari target. Sedangkan cakupan akses sanitasi layak mencapai 82,21 persen, dengan tingkat capaian 103,4 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Aceh telah melampaui target yang ditetapkan untuk kedua indikator, baik akses air minum maupun sanitasi layak.

Sebaliknya, data rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak untuk wilayah Bireuen menunjukkan target 92,00%, namun realisasi hingga saat ini 0%, sehingga nilai capaian masih 0%. Hasil ini menandakan bahwa perlunya percepatan pelaksanaan dan pengalokasian anggaran agar target dapat tercapai sesuai rencana.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Sasaran **Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak** tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:



Tabel 3.33

Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak”

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	7.121.970.900,00	6.924.090.300,00	97,2
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0,-	0,-	0,-

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Anggaran Untuk Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak hampir semua bersumber dana DAK.
2. Perencanaan yang baik sangat mendukung untuk keberhasilan pencapaian sasaran.
3. Sumber Manusia yang berkualitas menjadi faktor Penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran.
4. Kerja sama tim yang baik dan terarah sesuai arahan atasan adalah kunci keberhasilan pencapaian sasaran.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan lintas sector seperti Bappeda, Dinkes, DPMGPKB, PDAM dan para camat didalam kabupaten Bireuen, sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan di tingkatkan.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran, yang mengakibatkan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau bahkan tidak terlaksana sama sekali, sebagaimana terjadi pada Tahun 2025.
- 2) Perencanaan program yang belum optimal, termasuk dalam penetapan target, kebutuhan anggaran dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.34
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	100,0	97,2	2,8
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	0	0

Untuk *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum* menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,0% dengan tingkat penyerapan anggaran 97,2%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja berhasil dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien. Selisih antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran menunjukkan pengelolaan sumber daya yang cukup efektif. Sebaliknya, *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah* belum menunjukkan realisasi baik dari sisi capaian kinerja maupun penyerapan anggaran (0%) dikarenakan tidak adanya anggaran dan kegiatan pada program tersebut di tahun 2025.

Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi dengan indikator kinerja yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.35
Capaian Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi** Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	22,50	20,66	91,82

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.36

Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	22,50	20,66	91,82

1) **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Adapun rumus perhitungan Indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah sebagai berikut :

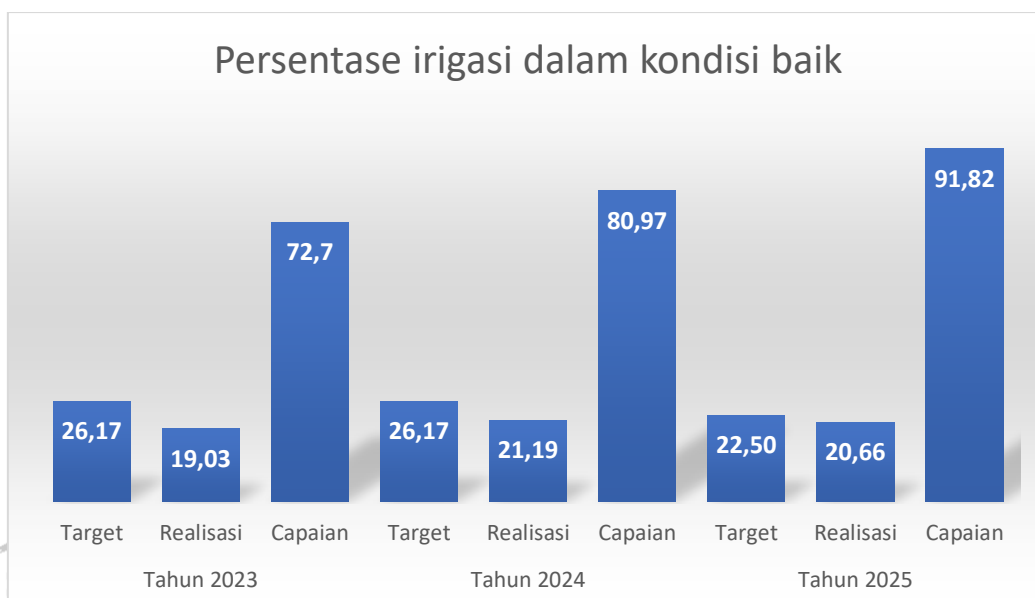
$$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Total Jaringan Irigasi}} \times 100\%$$

$$\frac{68165,7}{330075,4} \times 100 = 20,66 \%$$

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target 22,50% jaringan irigasi dalam kondisi baik. Hingga saat ini, realisasi capaian mencapai 20,66%, atau 91,82% dari target. Hasil ini menunjukkan adanya progres positif dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi.

2) **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Kinerja indikator persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 19,03% dari target 26,17% dengan tingkat capaian 72,7%, yang menandakan masih rendahnya kondisi jaringan irigasi yang berfungsi optimal. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan, dengan realisasi meningkat menjadi 21,19% dan capaian naik menjadi 80,97%, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja, meskipun target belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya pada tahun 2025, target diturunkan menjadi 22,50% dan realisasi mencapai 20,66%, sehingga capaian meningkat menjadi 91,82%. Secara persentase, kinerja semakin mendekati target, yang mengindikasikan adanya kemajuan bertahap dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi karena adanya pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta perbaikan target kinerja.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kinerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu.



D.I Peuraden



D.I Trienggadeng



D.I Bintahsa

- 4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.37
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	-	-	19,03	21,19	20,66

Untuk Indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun 2021-2022 tidak dapat diperbandingkan, karena indikator ini tidak ada dalam sasaran strategi RPJMK, Renstra tahun 2018- 2022 dan Renstra Perubahan 2018-2022. Indikator ini ada setelah penyusunan RPK tahun 2023- 2026 dan realisasi pada tahun 2024 adalah 21,19 persen dan pada tahun 2025 20,66 persen

- 5) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Dalam Kabupaten /Kota dalam provinsi aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.38
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun
 Terhadap Target Kinerja Standar Nasional/Dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

Indikator Kinerja	Provinsi	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Aceh	2025	Persen	75,12	72,98	97,15

Sumber: https://www.pengairan.acehprov.go.id/media/2026.02/laporan_final_evaluasi_hasil_renja_2025_pengairan1.pdf

Target persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Aceh pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 75,12%, sedangkan realisasinya mencapai 72,98%. Jika dihitung, nilai capaian sebesar 97,15%, menunjukkan bahwa realisasi hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR Kabupaten Bireuen menargetkan 22,50% dengan realisasi 20,66%, menghasilkan nilai capaian 91,82%. Secara keseluruhan, kedua capaian menunjukkan progres positif, namun masih diperlukan upaya peningkatan pemeliharaan dan pemantauan jaringan irigasi agar target optimal dapat tercapai di tahun-tahun mendatang.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

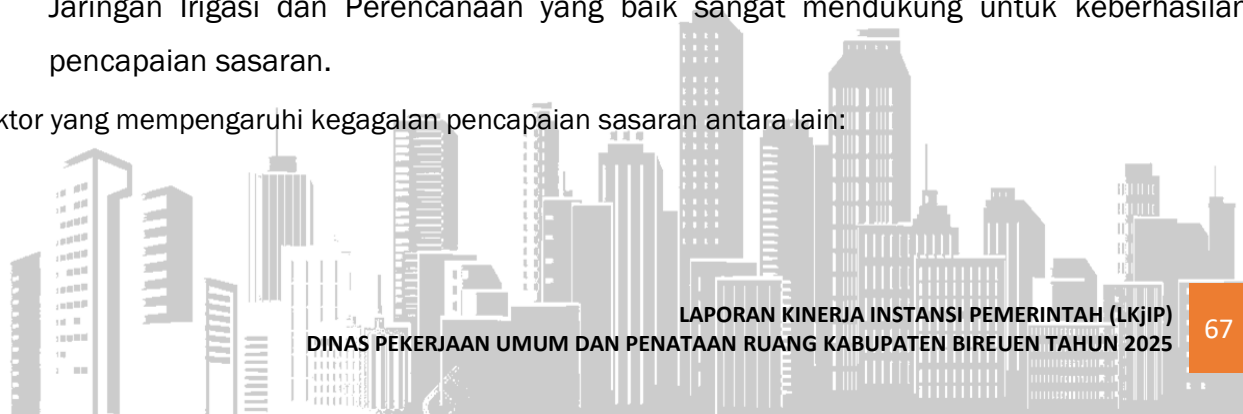
Tabel 3.39
 Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi ”

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.956.033.259,00	2.939.483.375,00	99,4

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- a. Anggaran Untuk Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi dan Perencanaan yang baik sangat mendukung untuk keberhasilan pencapaian sasaran.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain:



- a. Meningkatnya harga-harga bahan bangunan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen sehingga berpengaruh pada target capaian kinerja.

7) **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.40
 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	91,82	99,4	-7,58

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencatat capaian kinerja sebesar 91,82% dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,4%. Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -7,58%, yang menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efisien, karena hampir seluruh anggaran telah terserap, namun target kinerja belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran ke depan dapat lebih selaras dengan peningkatan capaian kinerja dalam mencapai tujuan Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

Sasaran 7: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja yaitu Nilai LKJIP Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.41
 Capaian Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Bobot	BB	BB	BB	Nilai capaian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat tahun 2024

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja dan capaiannya disajikan dibawah ini:

Tabel 3.42
 Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100	100

1) **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Perhitungan Indikator Nilai LKjIP Daerah dihasilkan dari skor hasil penilaian atas kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat yang menunjukkan tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2025 Dinas PUPR menargetkan nilai BB untuk nilai LKjIP Perangkat Daerah, dengan realisasi BB menggunakan nilai capaian tahun 2024, hal ini disebabkan Nilai LKjIP Perangkat Daerah tahun 2025 baru dapat diketahui setelah dilakukannya penilaian LKjIP oleh Inspektorat di tahun 2026.

- 2) **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

Tabel 3.43
 Indikator Kinerja yang mendukung untuk Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
 Kinerja Instansi Pemerintah

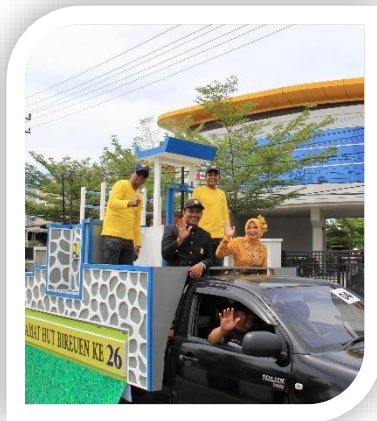
Indikator Kinerja	Satuan	2025		Nilai Capaian %	2024		Nilai Capaian %	2023		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100

Indikator Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 100% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja pada indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik, di mana pada tahun 2024 dan 2023 realisasi juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan penunjang urusan pemerintahan daerah telah terlaksana secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

- 3) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena adanya pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta perbaikan target kinerja.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kinerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja yang baik dan tepat waktu. Adapun kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas rutin bagian sekretariat pada Dinas PUPR, yang menjadi modal awal dalam melaksanakan tugas - tugas kedinasan dapat dilihat pada foto dokumentasi dibawah ini :



4) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.44
 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100	100

Capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan data realisasi, pada tahun 2023 indikator ini mencapai 100 persen, dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2024 dan tahun 2025 yang juga mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh layanan penunjang yang menjadi bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.45
 Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi ”

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.223.807.454,00	11.047.668.546,00	90,4

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- Perencanaan program dan kegiatan yang terarah, sehingga seluruh layanan penunjang dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Koordinasi yang baik antar unit kerja, yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi dan operasional perangkat daerah.
- Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung.
- Pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, sehingga kendala yang muncul dapat segera diatasi dan tidak menghambat pencapaian target.

- e) Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas layanan penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Meskipun indikator telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi layanan, antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa bidang tertentu, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- b) Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan regulasi, yang terkadang memerlukan waktu dalam proses implementasi.
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tertentu, yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas layanan secara lebih optimal.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.46
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	90,4	9.6

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,00% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,40%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja program dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Dengan demikian, program ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 9,60%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

3. 3. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen mengelola belanja yang dialokasikan pada perubahan anggaran sebesar **Rp. 69.460.662.989,-** dengan realisasi **Rp. 60.742.918.638,-** atau **87,45 Persen** dengan sisa anggaran **Rp. 8.717.744.351,-**

A. Target Dan Realisasi Serta Capaian Kinerja Program Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI				SISA	
			KINERJA PERUBAHAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	KINERJA A	%	KEUANGAN (Rp.)	%	KEUANGAN (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	12.223.807.454,00	100,0	100,0	11.047.668.546,00	90,4	1.176.138.908,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	22,50	2.956.033.259,00	20,66	91,81	2.939.483.375,00	99,4	16.549.884,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Air Minum	Persen	92,00	7.121.970.900,00	92,00	100,0	6.924.090.300,00	97,2	197.880.600,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	72,33	200.000.000,00	67,71	93,6	199.537.000,00	-	463.000,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Terbangun	Persen	37,00	8.454.716.268,00	37,00	100,0	8.055.188.800,00	95,3	399.527.468,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	51,79	38.260.247.508,00	51,20	98,87	31.349.848.100,00	81,94	6.910.399.408,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	4,50	38.330.800,00	5,17	114,8	21.871.200,00	57,1	16.459.600,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	205.556.800,00	Sesuai	Sesuai	205.231.317,00	99,8	325.483,00	
TOTAL BELANJA DAERAH					69.460.662.989,00		99,87	60.742.918.638,00	87,45	8.717.744.351,00

2. Efisiensi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025

Hingga akhir tahun 2025, kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2025 mencapai 87,45%. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai 99,87%. Berdasarkan tingkat capaian ini, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penerapan akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen telah melakukan efisiensi kinerja dengan tingkat efisiensi kinerja sebesar 12,42%. Efisiensi kinerja ini sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif diseluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan kepekaan dan kesadaran tentang perubahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Hal tersebut mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2025, seluruh hasil capaian Indikator dapat dinilai dengan Kategori **BAIK** dengan nilai Rata-rata capaian sebesar **99,87%**. Persentase capaian kinerja tersebut, terdiri dari sasaran strategis dan jumlah indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini



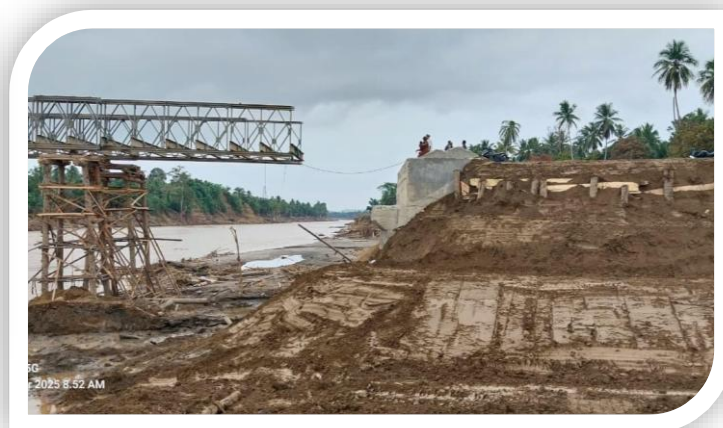
**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI				SISA	
			KINERJA PERUBAHAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	KINERJA	%	KEUANGAN (Rp.)	%	KEUANGAN (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	12.223.807.454,00	100,0	100,0	11.047.668.546,00	90,4	1.176.138.908,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	22,50	2.956.033.259,00	20,66	91,81	2.939.483.375,00	99,4	16.549.884,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Air Minum	Persen	92,00	7.121.970.900,00	92,00	100,0	6.924.090.300,00	97,2	197.880.600,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	72,33	200.000.000,00	67,71	93,6	199.537.000,00	-	463.000,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Terbangun	Persen	37,00	8.454.716.268,00	37,00	100,0	8.055.188.800,00	95,3	399.527.468,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	51,79	38.260.247.508,00	51,20	98,87	31.349.848.100,00	81,94	6.910.399.408,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	4,50	38.330.800,00	5,17	114,8	21.871.200,00	57,1	16.459.600,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	205.556.800,00	Sesuai	Sesuai	205.231.317,00	99,8	325.483,00	
TOTAL BELANJA DAERAH					69.460.662.989,00		99,87	60.742.918.638,00	87,45	8.717.744.351,00

Namun demikian, pada akhir tahun 2025 terjadi bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang melanda Aceh, termasuk Kabupaten Bireuen, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan terganggunya sejumlah layanan publik. Mengingat bencana tersebut baru saja terjadi menjelang akhir periode pelaporan, proses pemulihan dan perbaikan infrastruktur belum dapat terlaksana secara maksimal. Adapun upaya yang telah dan sedang dilakukan antara lain perbaikan darurat jalan yang terputus atau tergerus, pembangunan sementara jembatan penghubung, pembersihan material lumpur dan puing pada saluran drainase, Langkah-langkah tersebut merupakan tahap awal pemulihan, berbagai upaya tanggap darurat dan langkah awal rehabilitasi telah dan terus dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik serta mempercepat pemulihan kondisi pascabencana secara terencana dan berkelanjutan.





4.2 SARAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui koordinasi internal Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berkinerja lebih baik.
- 3) Bencana banjir yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025 menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya akses transportasi, serta ribuan warga terdampak termasuk di Kabupaten Bireuen, sehingga menuntut langkah konkret dari Dinas PUPR Kabupaten Bireuen berupa percepatan perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan rutin sistem drainase, pembangunan kolam retensi atau embung pengendali limpahan air, serta penyusunan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana agar risiko banjir di masa mendatang dapat ditekan secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025, mudah-mudahan dapat memberi gambaran yang mencukupi tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025.

Bireuen, 18 Februari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen



Ir. FADHLI, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tgk Chik Ditiro No. 20 email : pupr@bireuenkab.go.id

website : <https://pupr.bireuenkab.go.id> - Bireuen

Kode Pos : 24211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 900/1.12/01/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2025.
- b. Bahwa dengan pertimbangan point a tersebut di atas, perlu di atur dengan ditertibkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dengan susunan sebagaimana terlampir.

- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN.
- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen



Ir. FADHLI, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 900/1.12/01/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026
SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

Nama / NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
Ir.Fadhli, S.T.,M.T Nip. 19750826 200604 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua
Mubarik Juli Saputra, S.T.M.T Nip. 19720218 200112 1 002	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
Henni, S.T Nip.19820806 201103 2 001	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	Sekretaris
Munawardi, S.T. Nip. 19741205 200801 1 001	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
Maimun, S.T Nip. 19770924 200801 1 001	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
M. Akhyar, S.T Nip. 19750508 200901 1 001	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
Said Qamaruzzaman, S.T Nip. 19721819 200212 1004	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
Anwar, S.T. Nip. 19701029 200701 1 021	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen



IR. FADHIL, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FADHLI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JALALUDDIN, S.H., M.M.
Jabatan : Pj. Bupati Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Bireuen

JALALUDDIN, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen,

Ir. FADHLI, S.T., M.T.
Pembina TK.I
NIP. 19750826 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(KEPALA DINAS)**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKJIP perangkat daerah	BB Kategori
2	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	57,33 Persen
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	0,45 Persen
4	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	72,33 Persen
5	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penyediaan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	6,66 Persen
6	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	90,00 Persen
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,36 Persen

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.502.375.690,-	APBK
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.310.750.000,-	APBK DAK DIF
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.844.480.000,-	APBK DAK
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	300.000.000,-	APBI
6	Program Penataan Bangunan Gedung	15.341.358.269,-	APBI
7	Program Penataan Bangunan Lingkungannya	-	-

8	Program Penyelenggaraan Jalan	55.534.054.114,-	APBK DAK DOKA DBH DIF
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	57.032.400	APBK
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	240.000.000	APBK

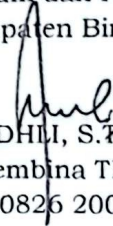
Bireuen, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Bireuen



JALALUDDIN, S.H., M.M.

Pihak
Pertama,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen,



Ir. FADHIL, S.P., M.T.
Pembina TK.I

NIP. 19750826 200604 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FADHLI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHLIS, S.T.
Jabatan : Bupati Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 10 November 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen,

Ir. FADHLI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001

Pihak Kedua,
Bupati Bireuen

MUKHLIS, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(KEPALA DINAS)**


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKJIP perangkat daerah	BB Kategori
2	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	51,79 Persen
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	0,42 Persen
4	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	72,33 Persen
5	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penyediaan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	4,50 Persen
6	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Rata-rata cakupan akses air minum dan sanitasi layak	92,00 Persen
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	22,50 Persen

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.223.807.454	APBK
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.956.033.259	APBK DAK DIF
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.121.970.900	APBK DAK
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	200.000.000	APBK
6	Program Penataan Bangunan Gedung	8.454.716.268	APBK
7	Program Penataan Bangunan Lingkungannya	-	-

8	Program Penyelenggaraan Jalan	38.260.247.508,-	APBK DAK DOKA DBH DIF
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	38.330.800,-	APBK
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	205.556.800,-	APBK

Bireuen, 10 November 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bireuen,


Ir. FADHLI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750826 200604 1 001

Pihak Kedua,
Bupati Bireuen


MUKHLIS, S.T.